



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan daerah.
7. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp10.744.536.321.400,00 (sepuluh triliun tujuh ratus empat puluh empat miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp5.608.776.752.400,00 (lima triliun enam ratus delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.149.362.000.000,00 (empat triliun seratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.227.594.873,00 (sembilan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp164.439.441.509,00 (seratus enam puluh empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah); dan
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.285.747.716.018,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu delapan belas rupiah).

Pasal 5

Pendapatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.149.362.000.000,00 (empat triliun seratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) yang terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.077.123.000.000,00 (satu triliun tujuh puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta rupiah);
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.095.156.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh lima miliar seratus lima puluh enam juta rupiah);

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.305.110.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima miliar seratus sepuluh juta rupiah);
- d. Pajak Air Permukaan sebesar Rp13.368.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah); dan
- e. Pajak Rokok sebesar Rp658.605.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar enam ratus lima juta rupiah).

Pasal 6

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp1.285.747.716.018,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu delapan belas rupiah) yang terdiri atas :

- a. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah);
- b. Jasa Giro sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah);
- c. Pendapatan Bunga sebesar Rp204.896.242.815,00 (dua ratus empat miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima belas rupiah);
- d. TPTGR sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp672.677.428.400,00 (enam ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp262.759.365.000,00 (dua ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah); dan
- g. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp118.299.679.803,00 (seratus delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah).

Pasal 7

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp5.132.219.569.000,00 (lima triliun seratus tiga puluh dua miliar dua ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Pasal 8

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.540.000.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Hibah.

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp10.511.755.061.412,00 (sepuluh triliun lima ratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta enam puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah) yang terdiri dari :

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 10

- (1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp5.419.098.902.515,00 (lima triliun empat ratus sembilan belas miliar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu lima ratus lima belas rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.764.489.220.825,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.261.248.587.690,00 (dua triliun dua ratus enam puluh satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp377.361.094.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.764.489.220.825,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.571.037.535.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp537.446.772.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp492.245.487.825,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp69.052.055.000,00 (enam puluh sembilan miliar lima puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp299.023.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.166.110.000,00 (lima miliar seratus enam puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp78.277.238.000,00 (tujuh puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (9) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.965.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.571.037.535.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan ASN; dan
 - k. Iuran Jaminan Kematian ASN.
 - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.073.703.670.000,00 (satu triliun tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp124.976.887.000,00 (seratus dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.571.881.000,00 (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.154.427.000,00 (lima puluh enam miliar seratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.669.993.000,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp75.352.790.000,00 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.837.316.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp36.868.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp171.347.952.000,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.693.014.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat belas ribu rupiah).
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp8.078.997.000,00 (delapan miliar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (13) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 5.613.740.000,00 (lima miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp537.446.772.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Beban Kerja;
 - b. Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Kondisi Kerja;
 - dan
 - c. Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Kelangkaan Profesi.
- (2) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp115.500.748.000,00 (seratus lima belas miliar lima ratus juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp421.946.024.000,00 (empat ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua puluh empat ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp492.245.487.825,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (tamsil) Guru PNSD; dan
 - e. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.180.860.000,00 (seratus dua puluh empat miliar seratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.855.000,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp330.613.757.155,00 (tiga ratus tiga puluh miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.400.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus juta rupiah).
 - (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.468.035.670,00 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.261.248.587.690,00 (dua triliun dua ratus enam puluh satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang; dan
 - b. Belanja Jasa.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp540.440.723.750,00 (lima ratus empat puluh miliar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp859.009.567.145,00 (delapan ratus lima puluh sembilan miliar sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 16

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Pasal 17

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp377.361.094.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik.

Pasal 18

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp1.288.129.124.777,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.210.352.941,00 (enam miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp292.531.147.223,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp353.308.840.131,00 (tiga ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus empat puluh ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp567.582.191.500,00 (lima ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp66.396.592.982,00 (enam puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).

Pasal 19

Anggaran Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp3.788.527.034.120,00 (tiga triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.943.590.766.667,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.844.936.267.453,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 21

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp499.218.740.012,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu dua belas rupiah) yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 22

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp133.218.740.012,00 (seratus tiga puluh tiga miliar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu dua belas rupiah) yang terdiri atas Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 23

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 direncanakan sebesar Rp133.218.740.012,00 (seratus tiga puluh tiga miliar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu dua belas rupiah) terdiri dari:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD; dan
 - b. Penghematan Belanja;
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.164.573.345,00 (tujuh belas miliar seratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp116.054.166.667,00 (seratus enam belas miliar lima puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp366.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar rupiah) yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh tempo.
- (2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp366.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar rupiah).

Pasal 25

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus sebesar Rp232.781.259.988,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp232.781.259.988,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 26

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan infrastruktur Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi pada Daerah Perbatasan Dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 27

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 ~~Desember~~ 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 15, ~~Desember~~ 2022
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



S.A. SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 36

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.608.776.752.400
4.1.01	Pajak Daerah	4.149.362.000.000
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.077.123.000.000
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	16.409.030.000
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	16.228.080.000
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	52.250.000
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	128.700.000
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	85.551.450.000
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	84.607.200.000
4.1.01.01.02.0002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	268.850.000
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	675.400.000
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	539.780.700.000
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	533.864.350.000
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	1.682.450.000
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	4.233.900.000
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	1.726.900.000
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	970.200.000
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	354.200.000
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	402.500.000
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	2.874.500.000
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	1.782.000.000
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	922.500.000
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	170.000.000
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	107.548.900.000
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	93.092.500.000
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	12.183.600.000
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	2.272.800.000
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	122.079.800.000
4.1.01.01.07.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	110.945.000.000
4.1.01.01.07.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	10.758.000.000
4.1.01.01.07.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	376.800.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	17.401.500.000
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	13.089.600.000
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	3.287.500.000
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	1.024.400.000
4.1.01.01.09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	1.518.500.000
4.1.01.01.09.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	1.363.500.000
4.1.01.01.09.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	155.000.000
4.1.01.01.09.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	0
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	181.997.825.400
4.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	180.918.907.900
4.1.01.01.10.0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	0
4.1.01.01.10.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	1.078.917.500
4.1.01.01.11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	222.284.600
4.1.01.01.11.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	222.284.600
4.1.01.01.11.0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	0
4.1.01.01.11.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	0
4.1.01.01.14	PKB-Mobil Roda Tiga	11.610.000
4.1.01.01.14.0002	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum	11.610.000
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.095.156.000.000
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	6.240.000.000
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	6.240.000.000
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	110.537.300.000
4.1.01.02.02.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	110.537.300.000
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	442.414.000.000
4.1.01.02.03.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	442.414.000.000
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	2.824.800.000
4.1.01.02.04.0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	2.824.800.000
4.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus	2.996.000.000
4.1.01.02.05.0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus	2.996.000.000
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	130.680.000.000
4.1.01.02.06.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	130.680.000.000
4.1.01.02.07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	52.312.400.000
4.1.01.02.07.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	52.312.400.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	57.660.000.000
4.1.01.02.08.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	57.660.000.000
4.1.01.02.09	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	3.942.400.000
4.1.01.02.09.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	3.942.400.000
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	284.472.959.200
4.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	284.472.959.200
4.1.01.02.11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	1.067.600.000
4.1.01.02.11.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	1.067.600.000
4.1.01.02.14	BBNKB-Mobil Roda Tiga	8.540.800
4.1.01.02.14.0001	BBNKB-Mobil Roda Tiga	8.540.800
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.305.110.000.000
4.1.01.03.01	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	836.703.862.600
4.1.01.03.01.0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin	836.703.862.600
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	467.768.282.800
4.1.01.03.02.0001	PBBKB Bahan Bakar Solar	467.768.282.800
4.1.01.03.03	PBBKB-Bahan Bakar Gas	637.854.600
4.1.01.03.03.0001	PBBKB Bahan Bakar Gas	637.854.600
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	13.368.000.000
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	13.368.000.000
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	13.368.000.000
4.1.01.05	Pajak Rokok	658.605.000.000
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	658.605.000.000
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok	658.605.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	9.227.594.873
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	8.500.000
4.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan	8.500.000
4.1.02.01.12.0003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	8.500.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	8.670.594.873
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.092.794.500
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	736.157.000
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	191.102.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	55.000.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	909.500.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	71.500.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	125.035.500
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	4.500.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	800.000.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	800.000.000
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	681.972.273
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	681.972.273
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	136.000.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	136.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	981.824.400
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	981.824.400
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	3.100.000.000
4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	3.100.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	878.003.700
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	743.003.700
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	135.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	548.500.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	45.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	45.000.000
4.1.02.03.05	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	3.500.000
4.1.02.03.05.0001	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu	3.500.000
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	500.000.000
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	500.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	164.439.441.509
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	164.439.441.509
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	163.367.441.509
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	163.367.441.509
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.072.000.000
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.072.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.285.747.716.018
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.100.000.000
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	5.100.000.000
4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	5.100.000.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.05	Jasa Giro	22.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	22.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	22.000.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	204.896.242.815
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	204.896.242.815
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	204.896.242.815
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	15.000.000
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	15.000.000
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	15.000.000
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	672.677.428.400
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	672.677.428.400
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	672.677.428.400
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	262.759.365.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	262.759.365.000
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	262.759.365.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	118.299.679.803
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	101.799.679.803
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	101.799.679.803
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	16.500.000.000
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	16.500.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.132.219.569.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.132.219.569.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	5.132.219.569.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	2.478.393.862.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	892.071.971.555
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	261.676.582.268
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	4.532.057.544
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	488.733.223
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	65.097.653.000
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	528.855.921.111
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	6.735.351.477
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	44.213.829.200
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	647.756.390.407

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	26.200.362.726
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	765.009.489
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.563.041.287.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	1.563.041.287.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	211.287.490.000
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	39.968.309.000
4.2.01.01.03.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	1.828.133.000
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	26.930.973.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	9.952.495.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.134.661.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	13.418.715.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	17.048.678.000
4.2.01.01.03.0051	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan	95.005.526.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	879.496.930.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	525.677.010.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	6.770.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	317.545.613.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	17.400.000.000
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	3.500.000.000
4.2.01.01.04.0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.976.461.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.416.564.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	909.482.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	301.800.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.540.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.540.000.000
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	3.540.000.000
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	3.540.000.000
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	3.540.000.000
	Jumlah Pendapatan	10.744.536.321.400
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	5.419.098.902.515

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01	Belanja Pegawai	2.764.489.220.825
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.571.037.535.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.073.703.670.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	787.916.736.000
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	285.786.934.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	124.976.887.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	76.735.219.000
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	48.241.668.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	15.571.881.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	15.571.881.000
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	56.154.427.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	56.154.427.000
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	32.669.993.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	11.710.327.000
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	20.959.666.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	75.352.790.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	43.570.600.000
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	31.782.190.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.837.316.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.835.997.000
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.319.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	36.868.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.123.000
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.745.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	171.347.952.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	155.277.690.000
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	16.070.262.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.693.014.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.889.371.000
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	803.643.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.078.997.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.668.074.000
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.410.923.000
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	5.613.740.000
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	3.939.518.000
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1.674.222.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	537.446.772.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	115.500.748.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	115.500.748.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	421.946.024.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	421.946.024.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	492.245.487.825
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	124.180.860.000
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	32.013.690.000
5.1.01.03.01.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	32.854.680.000
5.1.01.03.01.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	39.153.300.000
5.1.01.03.01.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	401.040.000
5.1.01.03.01.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	19.758.150.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	168.855.000
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	32.800.000
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	6.966.500
5.1.01.03.02.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	127.100.000
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.845.000
5.1.01.03.02.0029	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas	143.500
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	330.613.757.155
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	330.613.757.155
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	17.400.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	17.400.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	19.468.035.670
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	15.673.045.670
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.300.520.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	494.470.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	413.980.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	309.720.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	104.260.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	69.052.055.000
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	2.438.783.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	2.438.783.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	309.487.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	309.487.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	273.317.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	273.317.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	203.940.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	203.940.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	3.536.235.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	3.536.235.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	273.484.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	273.484.000
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	32.081.000
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	32.081.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	17.764.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	17.764.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	4.725.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	4.725.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.149.488.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.149.488.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	27.496.890.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	355.216.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.990.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	14.684.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	27.122.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10.650.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10.650.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	199.350.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	199.350.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	299.023.000
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	79.758.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	79.758.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.862.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.862.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	143.565.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	143.565.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.349.000
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.349.000
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.991.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	10.991.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	46.256.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	46.256.000
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	255.000
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	255.000
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	3.985.000
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	3.985.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	5.166.110.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	561.600.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	561.600.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	4.604.510.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	4.604.510.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	78.277.238.000
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	78.277.238.000
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	78.277.238.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	10.965.000.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	10.965.000.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	10.965.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.261.248.587.690
5.1.02.01	Belanja Barang	540.440.723.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	540.435.723.750
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	233.582.165
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.916.132.500

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	24.049.522.252
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	370.000.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.399.495.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	74.050.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	210.230.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	226.451.903
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11.076.137.080
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.708.086.450
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	2.762.340.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	199.220.000
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	30.000.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	4.940.000
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	500.000.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.048.293.993
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.838.462.923
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	237.640.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	61.156.581.343
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	876.020.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	39.815.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.088.202.500
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.887.808.164
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.338.749.785
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	48.010.450.750
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.437.842.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.740.330.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.711.537.060
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	26.383.339.200
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.777.376.829
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	134.541.351.778
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.778.527.160
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	100.000.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.138.000.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	210.530.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	2.245.000.000
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	21.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.275.122.118
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30.775.745.150
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	23.654.852.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	5.667.700.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	4.743.888.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30.455.374.100
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	2.650.685.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.721.259.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	3.283.200.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	190.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	886.000.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.363.973.047
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	3.000.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	358.644.000
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	8.000.000
5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	15.000.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	312.560.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.507.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.004.850.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	5.967.725.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	151.600.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	72.000.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	5.000.000
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	5.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	859.009.567.145
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	646.096.572.000
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	52.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	33.137.435.670
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.664.568.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	861.600.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	45.312.900.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	17.200.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	953.970.000
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	47.500.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	233.750.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.439.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	154.768.748.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	40.364.357.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	317.934.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	610.770.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	706.500.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.985.360.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	2.164.800.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.923.890.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	261.930.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	853.300.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	85.584.126.936
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.269.403.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.830.588.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	26.808.827.059
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	39.060.322.400
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	16.965.901.200
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.499.762.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	693.294.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	517.270.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	337.300.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.794.750.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	28.250.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.736.052.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	580.000.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	4.718.187.700
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	90.408.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	469.800.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	472.510.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.421.191.400
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	304.533.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	107.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	618.694.970
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	215.911.756
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	485.000.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	2.643.660.832
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	200.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	53.367.410.255
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.510.326.313
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	7.425.872.930
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	34.417.050.420
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.762.251.687
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.318.890.800
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	2.828.629.000
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	750.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.853.029.672
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	359.102.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	583.525.000
5.1.02.02.01.0074	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	2.055.880.000
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	6.733.747.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	75.712.919.264
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	69.998.040.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	547.188.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	438.673.512
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	156.157.752
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	4.572.860.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	2.318.270.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	20.000.000
5.1.02.02.03.0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	2.500.000
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	2.295.770.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	55.932.110.045
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	10.000.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	142.725.000
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	296.300.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.338.050.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	250.000.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	2.761.000.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	21.000.000
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	21.000.000
5.1.02.02.04.0057	Belanja Sewa Kapal Terbang	200.000.000
5.1.02.02.04.0058	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	6.000.000.000
5.1.02.02.04.0107	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pertanian	8.000.000
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	330.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.906.027.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	300.000.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	262.950.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.363.000.000
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	10.000.000
5.1.02.02.04.0135	Belanja Sewa Peralatan Cetak	135.000.000
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	133.737.500
5.1.02.02.04.0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	1.000.000
5.1.02.02.04.0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	119.700.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	24.023.919.845
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	2.500.000
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	40.500.000
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	13.170.371.700
5.1.02.02.04.0484	Belanja Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid	73.829.000
5.1.02.02.04.0491	Belanja Sewa Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	11.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.761.670.836
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.647.280.000
5.1.02.02.05.0003	Belanja Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	180.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.585.780.000
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	15.000.000
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	752.000.000
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	360.000.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	238.000.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	2.289.750.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	710.700.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.983.160.836
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	815.700.000
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	370.600.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	17.700.000
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	167.000.000
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	260.400.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	44.715.841.900
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	59.900.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	124.000.000
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	1.235.000.000
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	160.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	355.000.000
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	150.000.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	200.000.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	5.252.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	8.574.940.000
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	16.100.314.500
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	350.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.865.227.400
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	453.150.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.579.190.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.400.000.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	6.355.120.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	369.000.000
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	15.000.000
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	28.000.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	90.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.503.085.000
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	311.210.000
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	478.000.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	75.000.000
5.1.02.02.09.0005	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	596.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.134.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.100.000.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	787.875.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.721.000.000
5.1.02.02.09.0021	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataa-an	300.000.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	159.500.000
5.1.02.02.10.0001	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	100.000.000
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	59.500.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	461.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	315.000.000
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	146.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.433.398.100
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	9.737.881.500
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	150.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	3.141.700.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	2.403.816.600
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	99.500.000
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	99.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	148.279.342.895
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	4.496.400.000
5.1.02.03.01.0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	800.000.000
5.1.02.03.01.0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	8.000.000
5.1.02.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	743.400.000
5.1.02.03.01.0018	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir	20.000.000
5.1.02.03.01.0019	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang	1.800.000.000
5.1.02.03.01.0028	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	25.000.000
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	1.100.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.945.344.195
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	110.000.000
5.1.02.03.02.0005	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Hauler	50.000.000
5.1.02.03.02.0017	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	100.000.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	180.000.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	527.652.472
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	15.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.206.875.500
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	6.674.481.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	43.033.555
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	18.000.000
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	280.000.000
5.1.02.03.02.0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	30.000.000
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	10.000.000
5.1.02.03.02.0091	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	38.500.000
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	55.000.000
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	18.800.000
5.1.02.03.02.0110	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	25.000.000
5.1.02.03.02.0112	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	24.500.000
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	10.000.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	468.000.000
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	749.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.552.918.238
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	971.782.712
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	781.444.150
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.323.413.328
5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	114.000.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.713.600.000
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	2.000.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	40.000.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	100.000.000
5.1.02.03.02.0194	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio	36.746.200
5.1.02.03.02.0202	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	500.000
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	10.034.000.000
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	100.000.000
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	209.100.000
5.1.02.03.02.0250	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	108.000.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0251	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	60.000.000
5.1.02.03.02.0293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	200.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	600.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	185.482.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	423.000.000
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	80.000.000
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	40.000.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	23.215.040
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	35.000.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	502.300.000
5.1.02.03.02.0509	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	75.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	37.732.452.700
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	21.578.557.700
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	115.000.000
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	10.600.000.000
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	300.000.000
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	350.000.000
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	224.020.000
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	68.000.000
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	26.875.000
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	920.000.000
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	3.000.000.000
5.1.02.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	150.000.000
5.1.02.03.03.0049	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun	50.000.000
5.1.02.03.03.0054	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	300.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.399.606.000
5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	38.628.010.000
5.1.02.03.04.0012	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	9.000.000.000
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	3.176.000.000
5.1.02.03.04.0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	198.500.000
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	15.074.825.000
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	2.000.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.04.0104	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	130.000.000
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	76.000.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	1.050.271.000
5.1.02.03.04.0127	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	59.000.000
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	5.000.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	339.500.000
5.1.02.03.05.0001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	39.500.000
5.1.02.03.05.0033	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	30.000.000
5.1.02.03.05.0035	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	40.000.000
5.1.02.03.05.0040	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang	200.000.000
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	20.000.000
5.1.02.03.05.0064	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	10.000.000
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	366.040.000
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	326.040.000
5.1.02.03.06.0009	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	40.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	380.795.246.508
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	361.748.478.998
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	313.994.881.612
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	139.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.955.574.940
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	38.745.038.446
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.913.784.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	19.046.767.510
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa,ÀLuar Negeri	19.046.767.510
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.698.234.392
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.671.494.392
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.511.002.992
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	9.143.991.400
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	16.500.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.026.740.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.492.740.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	534.000.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	210.346.473.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	210.346.473.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	210.346.473.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	105.679.000.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	105.679.000.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	105.679.000.000
5.1.03	Belanja Bunga	16.000.000.000
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	16.000.000.000
5.1.03.04.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	16.000.000.000
5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	16.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	377.361.094.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	362.361.094.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	350.861.094.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	350.861.094.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.500.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.500.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	15.000.000.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	15.000.000.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	15.000.000.000
5.2	BELANJA MODAL	1.288.129.124.777
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.210.352.941
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	6.210.352.941
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	6.210.352.941
5.2.01.01.02.0009	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	6.210.352.941
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	292.531.147.223
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	10.064.500.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	5.733.000.000
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	3.233.000.000
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	2.500.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	4.331.500.000
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	519.000.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	1.200.000.000
5.2.02.01.03.0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	2.412.500.000
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	200.000.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	28.616.200.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	28.446.200.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.227.000.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	21.239.200.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	930.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	50.000.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	4.000.000.000
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	170.000.000
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	170.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	410.000.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	410.000.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	410.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	7.500.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	7.500.000
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	7.500.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	48.553.242.959
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	17.530.954.755
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	500.000.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	104.800.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	16.926.154.755
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	30.736.377.984
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	15.759.592.080
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	125.000.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	125.000.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	2.219.717.979
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	1.000.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.507.067.925
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	285.910.220
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	37.000.000
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	48.160.220
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	32.600.000
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	127.550.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	40.600.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.517.122.510
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	5.508.122.510
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	5.057.622.510
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	87.500.000
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	58.500.000
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	158.500.000
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	115.000.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	31.000.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	9.000.000
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	9.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	127.087.434.000
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	440.957.000
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	260.457.000
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	60.500.000
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	120.000.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	126.646.477.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	126.646.477.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.357.340.000
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.352.340.000
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	10.000.000
5.2.02.08.01.0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	62.000.000
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	100.000.000
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	1.180.340.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.005.000.000
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	950.000.000
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	55.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	12.184.298.754
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	7.563.801.845
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	250.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	4.591.645.841
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.722.156.004
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.620.496.909
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	300.000.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	298.000.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	403.102.911
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	100.850.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.518.543.998
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	30.000.000
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	30.000.000
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	30.000.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.661.500.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.661.500.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.661.500.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	541.000.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	541.000.000
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	541.000.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	45.191.009.000
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	45.191.009.000
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	45.191.009.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.310.000.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.310.000.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.310.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	353.308.840.131
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	347.488.840.131
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	344.448.840.131
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	141.586.287.131
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	5.400.000.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	3.150.000.000
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.500.000.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	163.843.968.000
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	4.989.795.000
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.487.070.000
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	2.800.000.000
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	16.691.720.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.040.000.000
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	3.000.000.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	40.000.000
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	1.730.000.000
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	1.730.000.000
5.2.03.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Peninggalan	1.730.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.890.000.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.890.000.000
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	545.000.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.120.000.000
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	225.000.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.200.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.200.000.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.200.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	567.582.191.500
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	530.277.191.500
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	468.277.191.500
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	468.277.191.500
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	62.000.000.000
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	62.000.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	35.907.000.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	9.184.000.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	9.184.000.000
5.2.04.02.03	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	3.694.000.000
5.2.04.02.03.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	3.694.000.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	6.035.000.000
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	6.035.000.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	16.994.000.000
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	16.994.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	898.000.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	898.000.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	898.000.000
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	500.000.000
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	500.000.000
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	500.000.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	66.396.592.982
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.907.227.002
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	432.387.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	297.387.000
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	135.000.000
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	1.474.840.002
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	1.300.000.000
5.2.05.01.02.0003	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	174.840.002
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.587.840.000
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	1.424.840.000
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	1.409.840.000
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	15.000.000
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	163.000.000
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	163.000.000
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	160.000.000
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	160.000.000
5.2.05.03.02.0004	Belanja Modal Ternak Lainnya	160.000.000
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	14.029.345.400
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	14.029.345.400
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	14.029.345.400
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	4.886.484.580
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	4.886.484.580
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	489.000.000
5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	1.431.331.480
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	2.966.153.100
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	43.300.696.000
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	43.300.696.000
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	43.300.696.000
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	525.000.000
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	525.000.000
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	525.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.100.000.000
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	2.100.000.000


PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.100.000.000
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	600.000.000
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.500.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	16.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	16.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	16.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	16.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	16.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	3.788.527.034.120
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.943.590.766.667
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.943.590.766.667
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	1.943.590.766.667
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	1.943.590.766.667
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.844.936.267.453
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	1.844.936.267.453
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	1.844.936.267.453
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	1.844.936.267.453
	Jumlah Belanja	10.511.755.061.412
	Total Surplus/(Defisit)	232.781.259.988
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	133.218.740.012
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	133.218.740.012
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	17.164.573.345
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	17.164.573.345
6.1.01.01.04.0017	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	17.164.573.345
6.1.01.05	Penghematan Belanja	116.054.166.667
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	116.054.166.667
6.1.01.05.04.0001	Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	116.054.166.667
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	133.218.740.012
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	366.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	366.000.000.000
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	366.000.000.000

PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.2.03.04.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	366.000.000.000
6.2.03.04.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	366.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	366.000.000.000
	Pembiayaan Netto	(232.781.259.988)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Gubernur Sumatera Selatan



H. Herman Deru